



SULAWESI SELATAN

PDAM KAB BARRU

Dana Penyertaan Modal PDAM, Pembangunan Reservoir Dikerja Sendiri Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru menerima Anggaran Dari Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 500 juta untuk kegiatan peningkatan layanan untuk pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat yang belum menikmati air bersih serta di tahun anggaran 2022 akan di beri kembali sebesar Rp. 1 Milyar. Namun, diketahui pekerjaan proyek pembangunan reservoir oleh PDAM Kab.Barru bukan bagian tehknis konstruksi, sehingga kuat dugaan bisa terjadi persekongkolan dalam hal penggunaan anggaran, baik secara tehknis pelaksanaan pekerjaan maupun jaminan kawalitas hasil pekerjaan.

(Sumber: <https://kembaroginews.com/2022/02/07/35607/> tanggal 7 Februari 2022)

PDAM KAB JENEPONTO

Warga Tamanroya dan PB DPRD Gelar Aksi, Desak Bupati Copot Direktur PDAM Jeneponto

Ratusan massa yang mengatasnamakan dirinya gabungan warga Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea dan Pengurus Besar Dewan Pergerakan Revolusi Demokratik (PB DPRD) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PDAM dan di depan kantor Bupati Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan lantaran ir PDAM Jeneponto akhir-akhir ini sudah 1 bulan kurang lancar mengalir ke Kelurahan Tamanroya dan menduga adanya tindak pidana korupsi di tubuh PDAM Jeneponto dalam penggunaan aggaran, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Hal itu dibuktikan, adanya pengadaan kendaraan motor dinas sebanyak 5 unit. Jatong menduga melanggar aturan karena kepemilikan atas nama pribadi serta adanya dugaan pemotongan upah pegawai yang diduga dilakukan oleh oknum pimpinan PDAM Jeneponto.

(Sumber: <https://diswaysulsel.com/warga-tamanroya-dan-pb-dprd-gelar-aksi-desak-bupati-copot-direktur-pdam-jeneponto/> tanggal 13 September 2023)

PD BERDIKARI KAB KEPULAUAN SELAYAR

Fraksi Bangkit Sejahtera Desak Pemda Segera Manfaatkan Pasar Rakyat di Daratan dan Pulau

Ketua DPRD Kepulauan Selayar telah memimpin Rapat Paripurna DPRD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD. P) tahun 2023 Kepulauan Selayar. Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD tahun 2023 Kepulauan Selayar yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pendapat akhir 5 fraksi di DPRD Selayar juga telah disampaikan, diantaranya Fraksi Demokrat yang mendesak Pemda Kepulauan Selayar terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk melakukan penagihan piutang rekening air di masyarakat senilai Rp 5 miliar lebih. Tentu dengan harapan PDAM tidak lagi bergantung pada APBD dalam memperbaiki kerusakan seperti meteran dan kebutuhan lainnya. Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyinggung PD Berdikari yang telah menerima penyertaan modal senilai Rp 7 M. Karena itu, Fraksi Demokrat mempertanyakan kepada Pemda mengenai pengelolaan dan manajemen BUMD ini yang dinilai belum memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk PAD.

(Sumber: https://reformasiaktual.com/2023/09/29/fraksi-bangkit-sejahtera-desak-pemda-segera-manfaatkan-pasar-rakyat-di-daratan-dan-pulau/#google_vignette tanggal 29 September 2023)

PDAM KAB TANA TORAJA

Kejari Tana Toraja Bidik Tersangka Baru Kasus Korupsi Hibah PDAM
Kejaksaan Negeri Tana Toraja menggeledah kantor PDAM dan kantor BPKAD Pemkab Toraja Utara Selasa (31/8), terkait kasus dugaan korupsi mantan Direktur PDAM Toraja Utara pada program hibah air minum perkotaan tahun anggaran 2017-2019 dan 2020. Dalam kasus ini kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1,7 miliar. Pihak Kejari Tana Toraja belum melakukan penahanan terhadap Markus Leppang, mantan Dirut PDAM Toraja Utara, meski telah ditetapkan sebagai tersangka.

(Sumber: <https://www.tvonenews.com/berita/investigasi/5126-kejari-tana-toraja-bidik-tersangka-baru-kasus-korupsi-hibah-pdam?page=1> tanggal 1 September 2021)

PDAM TIRTA SAWITTO KAB PINRANG

Ada 27 Kasus Korupsi Mandek di Pinrang, Demonstran: Tidak Pernah Ada Penetapan Tersangka

Aliansi Pemuda, Mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Pinrang turun melakukan aksi demonstrasi untuk memperingati Hari Anti Korupsi di kantor bupati, DPRD, Polres dan juga Kejari Pinrang, Kamis 9 Desember. Koordinator Aliansi, Andri Ardi Anda, mengungkapkan, jika dirinya bersama dengan mahasiswa, pemuda, juga masyarakat, turun melakukan aksi unjuk rasa untuk mempertegas komitmen dari Aparat Penegak Hukum (APH), menyangkut kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Pinrang. Aliansi menginginkan agar APH melakukan upaya penyelidikan dan menjadikan atensi terhadap berbagai kegiatan pada lingkup Pemda Kabupaten Pinrang yang dicurigai, atau berpotensi terjadi dugaan tindak pidana korupsi, salah satunya adalah Pemberian dana hibah untuk Perusahaan Daerah Tirta Sawitto PD karya.

(Sumber: <https://pinrang.terkini.id/2021/12/09/ada-27-kasus-korupsi-mandek-di-pinrang-demonstran-tidak-pernah-ada-penetapan-tersangka/> tanggal 9 Desember 2021)

PD KARYA KAB PINRANG

Mahasiswa Pinrang Minta KPK Segera Periksa Andi Irwan Hamid dan Andi Aslam Patonangi

Aliansi Mahasiswa Pinrang se-Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aliansi berharap komitmen Ketua KPK Firli Bahuri dengan visi dan misi KPK dan masyarakat dalam menurunkan angka korupsi atau mengatasi segala bentuk korupsi yang senantiasa berkembang serta penindakan terhadap pelaku korupsi akan dilaksanakan KPK secara proporsional dan akuntabel demi kepentingan umum untuk mewujudkan Indonesia berkekuatan ekonomi terbesar pada tahun 2045. Mengingat supremasi hukum di Pinrang lemah sebab masih banyak ketimpangan sampai pada kemandekan kasus-kasus korupsi yang ada di tubuh penegak hukum, salah satunya dugaan korupsi aset daerah yang dikelola perusahaan daerah PD Karya Pinrang diantaranya, persawahan Pemkab yang terletak di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa, Pinrang seluas 50 Ha.

(Sumber: <https://makassar.tribunnews.com/2022/09/22/mahasiswa-pinrang-minta-kpk-segera-periksa-andi-irwan-hamid-dan-andi-aslam-patonangi> tanggal 22 September 2022)

PDAM KOTA MAKASSAR

Walkot Danny Pomanto Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi PDAM Makassar

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto diperiksa sebagai saksi kasus korupsi Rp 20 miliar di lingkup Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar hari ini. Danny diperiksa bersama sejumlah saksi lainnya. penyidik hendak mendalami kasus korupsi PDAM Makassar yang sebelumnya telah ditetapkan 2 tersangka yaitu adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Haris Yasin Limpo sebagai tersangka kasus korupsi Rp 20 miliar di lingkup PDAM Makassar tersebut. Satu tersangka lainnya adalah mantan Direktur Keuangan (Dirkeu) Irawan Abadi.

(Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-6670986/walkot-danny-pomanto-diperiksa-sebagai-saksi-kasus-korupsi-pdam-makassar> tanggal 13 April 2023)

PD PASAR MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR

Pemkot Makassar merugi Rp26 miliar akibat tindak pidana korupsi KSU Bina Duta

Pemkot makassar mengalami kerugian sebesar Rp26 miliar saat pengelolaan Pasar Butung berada di bawah kendali Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Duta. Tim khusus Kejari menemukan kerugian yang ditaksir Pemkot makassar atas tindak korupsi ini sebesar Rp26 miliar. Hal ini sesuai dengan hitungan administrasi di KSU Bina Duta. Meskipun demikian, angka yang sebenarnya dimungkinkan masih lebih tinggi karena masih banyaknya administrasi yang belum ditemukan.

Pasar Butung adalah aset pemkot Makassar sehingga baik penguasaan dan pengelolaan seharusnya menjadi hak dan kewenangan Pemkot makassar dalam hal ini adalah PD Pasar Makassar Raya. Sebelumnya, Pimpinan KSU Bina Duta, Adri Yusuf, juga telah terseret kasus korupsi terkait dana sewa kios di Pasar Butung. Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidi 6 bulan kurungan kepada Andri Yusuf sebagai akibat dari keterlibatannya dalam tindak korupsi tersebut.

(Sumber: <https://makassar.antaranews.com/berita/511206/pemkot-makassar-merugi-rp26-miliar-akibat-tindak-korupsi-ksu-bina-duta> tanggal 2 November 2023)

PERUSDA KOTA PALOPO

1. Menolak Lupa Kasus Dugaan Korupsi Keripik Zaro di Palopo

Sumber: <https://kedai-berita.com/2019/10/21/menolak-lupa-kasus-dugaan-korupsi-keripik-zaro-di-palopo/> tanggal 21 Oktober 2019

2. Jaksa akan Periksa Kadis Koperasi Palopo Soal Korupsi Keripik Zaro

Kejati Sulawesi Selatan terus menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi keripik zaro yang dikelola Perusahaan Daerah Kota Palopo senilai Rp2,5 miliar tahun 2015. Penyidik membidik sejumlah pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan ringan yang menggunakan APBD Palopo tersebut. Seperti Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo Karno dan para direksi Perusda. Jaksa mencium indikasi korupsi berjamaah, dimana Perusda Palopo yang mengelola anggaran APBD Pokok Palopo tahun 2015 sebesar Rp11 miliar lebih untuk memproduksi keripik Zaro, namun Perusda yang ditunjuk tidak bisa memproduksinya lantaran bangkrut. Diduga anggaran terdapat anggaran yang termasuk untuk perbaikan mesin pembangkit listrik tenaga mikro hidro atau PLTM. Diketahui, Walikota Palopo HM Judas Amir melantik tiga jajaran direksi Perusda pada tahun 2015 yakni Direktur Utama, Amir Tarria, Direktur Produksi dan Operasional, Reski Ihsan Humang, dan Direktur Pemasaran dan Operasional, Asmal.

(Sumber: <https://www.ujungjari.com/2019/04/16/jaksa-akan-periksa-kadis-koperasi-palopo-soal-korupsi-keripik-zaro/> tanggal 16 April 2019)

3. Divonis 3 Bulan Penjara karena Beritakan Dugaan Korupsi di Palopo, Jurnalis Asrul Ajukan Banding

Muhammad Asrul, jurnalis berita.news mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar, merespons vonis 3 bulan penjara karena menulis dugaan korupsi di Palopo.

Selasa (23/11/2021) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menjatuhkan vonis 3 bulan penjara kepada seorang jurnalis bernama Muhammad Asrul. Asrul terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kasus hukum yang menimpa Asrul berawal saat ia menulis tiga berita soal dugaan korupsi. Ketiga berita tersebut yakni, Putra Mahkota Palopo Diduga 'Dalang' Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp 11 M yang terbit pada 10 Mei 2019. Kemudian Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas yang terbit 24 Mei 2019, dan terakhir Jilid II Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp 5 M, Sinyal Penyidik untuk Farid Judas? yang terbit 25 Mei 2019.

(Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2021/12/14/203112478/divonis-3-bulan-penjara-karena-beritakan-dugaan-korupsi-di-palopo-jurnalis?page=all> tanggal 14 Desember 2021)

PDAM KOTA PARE-PARE

a. Polisi Kesulitan Temukan Dalang Rekening Fiktif Piutang PDAM Parepare
Polres) Parepare kesulitan menemukan dalang kasus dugaan korupsi rekening fiktif piutang kepada pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Parepare yang hampir mencapai Rp 6 miliar.

Kasus dugaan korupsi di tubuh salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Parepare ini bergulir sejak beberapa bulan terakhir tetapi prosesnya masih tetap dalam proses penyelidikan. Polisis sendiri sebelumnya sudah memeriksa belasan staf PDAM Parepare terkait rekening pelanggan yang diduga fiktif ini hanya saja masih belum menemukan titik temu dan posisi yang diperiksa masih sebatas saksi.

(Sumber: <https://makassar.tribunnews.com/2017/02/20/polisi-kesulitan-temukan-dalang-rekening-fiktif-piutang-pdam-parepare> tanggal 20 Februari 2017)